

PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT MARJINAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Dr. Carlos Maia



KOLABORASI
KOMUNITAS



PEMBERDAYAAN



KEADILAN
SOSIAL



PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

*“Tak ada perubahan yang adil
jika ada masyarakat yang tertinggal.”*



PENORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT MARJINAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.



**Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
Marjinal di Kawasan Asia Tenggara**

Penulis:

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-623-8067-98-5

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: vi + 158 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,

Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya berjudul “Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Marjinal di Kawasan Asia Tenggara” dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini hadir dari keprihatinan terhadap realitas sosial yang masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang tertinggal, terpinggirkan, dan belum memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, serta ruang partisipasi dalam pembangunan. Di tengah kemajuan kawasan Asia Tenggara yang terus bergerak secara ekonomi dan politik, persoalan kemarjinalan tetap menjadi tantangan penting yang perlu dipahami secara mendalam dan ditangani melalui pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam karya ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep masyarakat marjinal, faktor penyebab kemarjinalan, dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hak asasi manusia, serta strategi pengorganisasian dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, karya ini juga mengulas peran negara, lembaga non-negara, sektor swasta, teknologi, pendidikan kritis, hingga kolaborasi regional ASEAN dalam memperkuat kapasitas masyarakat marjinal. Setiap pembahasan diarahkan agar pembaca dapat memahami bahwa pengembangan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat, tetapi harus dibangun melalui partisipasi, penguatan kapasitas, solidaritas sosial, serta keberpihakan kebijakan kepada kelompok yang selama ini kurang memperoleh ruang dalam proses pembangunan.

Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, aktivis sosial, organisasi masyarakat sipil, pelaku pembangunan, dan pembaca umum yang memiliki perhatian terhadap keadilan sosial di Asia Tenggara. Gagasan-gagasan yang disajikan diharapkan mampu mendorong kesadaran bahwa tidak ada pembangunan yang benar-benar adil apabila masih ada masyarakat yang tertinggal dan tidak berdaya. Agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak kalangan, karya ini akan dicetak sebanyak mungkin untuk disebarluaskan kepada lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, organisasi sosial, instansi pemerintahan, dan pihak-pihak yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat marjinal.

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi.....	III
Bagian 1 — Membuka Percakapan tentang Masyarakat Marjinal	1
A. Mengapa Tema Ini Mendesak	1
B. Apa yang Akan Pembaca Temukan.....	4
C. Mengapa Asia Tenggara.....	6
D. Dari Mana Bahan Buku Ini.....	8
Bagian 2 — Konsep Dasar Masyarakat Marjinal	10
A. Definisi dan Karakteristik Kemarjinalan	10
B. Faktor-Faktor Penyebab Kemarjinalan.....	12
C. Tipologi dan Klasifikasi Masyarakat Marjinal.....	15
D. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	18
Bagian 3 — Gambaran Umum Kawasan Asia Tenggara.....	21
A. Profil Geografis dan Demografis ASEAN	21
B. Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik	23
C. Peta Kemarjinalan di Asia Tenggara.....	26
D. Perbandingan Indeks Pembangunan dan Ketimpangan	28
Bagian 4 — Cara Membaca dan Menganalisis Kemarjinalan.....	30
A. Teori Pemberdayaan dan Organisasi Sosial.....	30
B. Pendekatan Partisipatif dan Inklusif	34
C. Model Analisis Kebijakan Publik	37
D. Kerangka Evaluasi Program Pemberdayaan.....	40

Bagian 5 — Dimensi Sosial Kemarjinalan.....	43
A. Pendidikan dan Akses Literasi	43
B. Kesehatan dan Pelayanan Dasar.....	46
C. Relasi Gender dan Ketidaksetaraan	48
D. Dinamika Budaya dan Identitas Lokal	51
Bagian 6 — Dimensi Ekonomi Kemarjinalan	54
A. Lapangan Kerja dan Kerentanan Pekerja.....	54
B. Ekonomi Informal dan Tantangannya.....	56
C. Akses Permodalan dan Sumber Daya	58
D. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal	61
Bagian 7 — Dimensi Politik dan Hak Asasi Manusia.....	65
A. Representasi Politik Kelompok Marjinal	65
B. Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat.....	67
C. Kebijakan Publik yang Diskriminatif	69
D. Mekanisme Perlindungan HAM	72
A. Prinsip-Prinsip Dasar Pengorganisasian	75
B. Tahapan Pemberdayaan Komunitas	78
C. Peran Fasilitator dan Pemimpin Lokal.....	80
D. Studi Kasus Lapangan di Asia Tenggara.....	83
Bagian 9 — Peran Lembaga Negara	86
A. Kebijakan Nasional dan Peraturan Pendukung.....	86
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan.....	88
C. Skema Perlindungan Sosial Terpadu	91
D. Kolaborasi Antar-Negara ASEAN	93
Bagian 10 — Peran Lembaga Non-Negara.....	96
A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	96
B. Peran Sektor Swasta dan CSR.....	98

C. Organisasi Basis Komunitas	100
D. Kemitraan Multisektor yang Efektif.....	103
Bagian 11 — Inovasi dan Teknologi untuk Pemberdayaan.....	106
A. Digitalisasi Layanan Publik	106
B. Teknologi Tepat Guna untuk Pedesaan.....	108
C. Platform Crowdfunding dan Ekonomi Kreatif	110
D. Studi Keberhasilan Inovasi Digital	112
Bagian 12 — Pendidikan Kritis dan Penguatan Kapasitas.....	115
A. Kurikulum Pendidikan Masyarakat.....	115
B. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan.....	117
C. Pendidikan Politik dan Kesadaran Hak Warga	119
D. Penguatan Modal Sosial dan Solidaritas	121
Bagian 13 — Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan.....	124
A. Hambatan Struktural dan Birokrasi	124
B. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan.....	125
C. Resistensi Sosial dan Budaya	127
D. Risiko Keamanan dan Konflik Sosial	129
Bagian 14 — Strategi dan Rekomendasi Penguatan	132
A. Pendekatan Inklusif dan Partisipatif.....	132
B. Kebijakan Pro-Masyarakat Marjinal	134
C. Penguatan Kolaborasi Regional ASEAN.....	136
D. Roadmap Pemberdayaan 10 Tahun ke Depan	138
Bagian 15 — Menuju Masyarakat Inklusif Asia Tenggara	141
A. Pelajaran Penting yang Bisa Dipetik.....	141
B. Capaian dan Harapan Masa Depan.....	143
C. Peran Generasi Muda dan Akademisi.....	144
D. Visi Asia Tenggara yang Setara dan Berkeadilan.....	146

Penutup	149
Daftar Pustaka	151
Profil Penulis.....	156

Bagian 1 — Membuka Percakapan tentang Masyarakat Marjinal

A. Mengapa Tema Ini Mendesak

Dalam lanskap sosial, ekonomi, dan politik kontemporer, istilah *marginalisasi* telah menjadi salah satu konsep kunci yang memerlukan perhatian serius, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kompleksitas budaya, sejarah, dan struktur sosial yang unik. Kawasan ini dihuni oleh lebih dari 680 juta penduduk yang tersebar di berbagai negara dengan tingkat pembangunan yang sangat bervariasi, mulai dari negara dengan ekonomi menengah ke atas seperti Singapura hingga negara dengan tantangan pembangunan signifikan seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekuatan dalam membentuk identitas kawasan, juga melahirkan kesenjangan yang tajam antara kelompok sosial, yang pada gilirannya melahirkan populasi yang dikategorikan sebagai masyarakat marjinal.

Secara konseptual, masyarakat marjinal bukan hanya mereka yang miskin secara ekonomi, melainkan juga mereka yang tersisih dari akses penuh terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak yang dijamin oleh negara maupun norma internasional. Marginalisasi dapat terjadi akibat faktor struktural seperti kebijakan publik yang tidak inklusif, sistem pendidikan yang timpang, atau kebijakan ekonomi yang tidak merata. Di Asia Tenggara, gejala ini sering kali diperparah oleh warisan sejarah kolonialisme, konflik etnis, korupsi struktural, dan penetrasi ekonomi global yang tidak selalu menguntungkan kelompok rentan.

Bagian 2 — Konsep Dasar Masyarakat Marjinal

A. Definisi dan Karakteristik Kemarjinalan

Dalam wacana pembangunan dan ilmu sosial, istilah *kemarjinalan* merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok ditempatkan di pinggiran struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya, sehingga mereka mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap warga negara. Kondisi ini bukan sekadar fenomena kemiskinan ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi eksklusi sosial yang membuat kelompok tersebut kehilangan atau tidak diakui secara penuh sebagai bagian dari komunitas yang berdaya. Dengan kata lain, kemarjinalan adalah bentuk ketidaksetaraan yang kompleks, di mana faktor ekonomi, politik, sosial, dan kultural saling berkelindan.

Dalam literatur internasional, *marginalization* sering dipahami sebagai proses, bukan sekadar status. Artinya, kemarjinalan terjadi melalui interaksi yang terus-menerus antara struktur kekuasaan dan posisi individu atau kelompok dalam masyarakat. Proses ini dapat berlangsung secara eksplisit, seperti melalui kebijakan yang diskriminatif, maupun secara implisit melalui norma dan praktik sosial yang menguntungkan sebagian kelompok dan merugikan kelompok lain. Oleh karena itu, memahami kemarjinalan memerlukan analisis yang melampaui data kuantitatif, karena ia mengandung dimensi pengalaman subjektif yang mempengaruhi harga diri, rasa memiliki, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Bagian 3 — Gambaran Umum Kawasan Asia Tenggara

A. Profil Geografis dan Demografis ASEAN

Asia Tenggara merupakan kawasan yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi geografis ini menempatkan kawasan ini pada jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Wilayah Asia Tenggara meliputi sebelas negara, sepuluh di antaranya merupakan anggota resmi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Timor-Leste, meskipun belum resmi menjadi anggota penuh, memiliki keterkaitan geografis, ekonomi, dan politik yang kuat dengan kawasan ini.



Gambar Peta Kawasan ASEAN

Secara total, kawasan Asia Tenggara memiliki luas sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan bentang alam yang sangat

Bagian 5 — Dimensi Sosial Kemarjinalan

A. Pendidikan dan Akses Literasi

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mengatasi kemarjinalan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas memberikan fondasi bagi peningkatan kapasitas individu, mobilitas sosial, dan partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks Asia Tenggara, pendidikan berperan sebagai jembatan yang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Namun, kenyataannya, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius di banyak negara di kawasan ini, terutama bagi kelompok masyarakat marjinal yang hidup di wilayah terpencil, miskin, atau termarginalkan secara sosial.

Kemarjinalan di bidang pendidikan dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu akses dan kualitas. Dari segi akses, tantangan muncul dalam bentuk jarak sekolah yang jauh, biaya tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan belajar, serta hambatan sosial seperti norma budaya yang membatasi partisipasi kelompok tertentu, terutama anak perempuan. Di beberapa wilayah pedalaman Myanmar, anak-anak harus menempuh perjalanan kaki selama berjam-jam untuk mencapai sekolah terdekat. Situasi serupa terjadi di pedalaman Papua, Indonesia, di mana minimnya infrastruktur transportasi membuat kehadiran siswa tidak stabil.

Dari segi kualitas, permasalahan meliputi kurangnya guru yang berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, dan kurikulum yang tidak relevan dengan konteks lokal. Banyak sekolah di daerah marjinal yang mengalami kekurangan guru, dan yang ada sering kali ditempatkan secara sementara atau tidak memiliki pelatihan

Bagian 6 — Dimensi Ekonomi Kemarjinalan

A. Lapangan Kerja dan Kerentanan Pekerja

Lapangan kerja merupakan salah satu faktor penentu utama kesejahteraan masyarakat. Bagi kelompok marjinal di Asia Tenggara, pekerjaan bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga sarana untuk membangun identitas sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk perlindungan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi kelompok marjinal sering kali terbatas, tidak stabil, dan berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.

Kerentanan pekerja di kawasan ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama: ketersediaan lapangan kerja, kualitas pekerjaan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pertama, dari sisi ketersediaan, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara tidak selalu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai bagi kelompok marjinal. Sektor padat modal seperti pertambangan, manufaktur besar, atau teknologi cenderung menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah terbatas, sehingga pekerja dengan pendidikan rendah sulit masuk. Sebaliknya, lapangan kerja yang lebih banyak tersedia bagi mereka justru berada di sektor dengan produktivitas rendah, seperti pertanian subsisten, jasa informal, atau pekerjaan kasar di konstruksi.

Kedua, kualitas pekerjaan bagi kelompok marjinal sering kali berada di bawah standar layak. Banyak dari mereka bekerja dalam kondisi upah rendah, jam kerja panjang, tanpa kontrak tertulis, dan

Bagian 7 — Dimensi Politik dan Hak Asasi Manusia

A. Representasi Politik Kelompok Marjinal

Representasi politik adalah salah satu indikator utama sejauh mana sebuah sistem politik inklusif dan demokratis. Bagi kelompok marjinal di Asia Tenggara, keterwakilan dalam lembaga politik bukan hanya persoalan simbolik, tetapi juga sarana untuk memperjuangkan kepentingan, melindungi hak, dan memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, realitas politik di kawasan ini menunjukkan bahwa representasi kelompok marjinal masih jauh dari memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keterwakilan dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, representasi deskriptif, yaitu sejauh mana komposisi lembaga politik mencerminkan keragaman masyarakat, termasuk kelompok etnis minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Kedua, representasi substantif, yaitu sejauh mana perwakilan yang ada benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut di arena kebijakan. Dalam banyak kasus, keberadaan individu dari kelompok marjinal di lembaga legislatif tidak otomatis menjamin advokasi efektif bagi komunitasnya, terutama jika yang bersangkutan terikat pada kepentingan partai atau elite politik dominan.

Di Asia Tenggara, hambatan terhadap representasi politik kelompok marjinal mencakup faktor struktural, kultural, dan ekonomi. Secara struktural, sistem pemilu di beberapa negara kurang memberikan ruang bagi kandidat independen atau partai

Bagian 8 — Prinsip dan Tahapan Pengorganisasian Masyarakat

A. Prinsip-Prinsip Dasar Pengorganisasian

Pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) merupakan proses sistematis untuk membangun kekuatan kolektif suatu komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, merancang solusi, dan mengambil tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks masyarakat marjinal di Asia Tenggara, pengorganisasian bukan hanya sebuah metode intervensi sosial, tetapi juga strategi politik dan ekonomi untuk menyeimbangkan kekuatan antara komunitas dengan aktor-aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya.

Prinsip-prinsip dasar pengorganisasian masyarakat bersifat universal, namun penerapannya selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi setempat. Ada sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan keberhasilan proses pengorganisasian, dan setiap prinsip ini saling berkaitan serta harus dijalankan secara konsisten.

1. Partisipasi Aktif dan Bermakna

Partisipasi masyarakat adalah inti dari pengorganisasian. Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif, bukan sekadar kehadiran simbolis, dalam setiap tahap proses. Partisipasi yang bermakna berarti masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan, serta akses terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Dalam masyarakat pedesaan di Laos atau Myanmar, misalnya, pengorganisasian berhasil ketika warga terlibat

Bagian 9 — Peran Lembaga Negara

A. Kebijakan Nasional dan Peraturan Pendukung

Peran lembaga negara dalam pemberdayaan masyarakat marjinal tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional dan peraturan pendukung yang menjadi pijakan formal bagi pelaksanaan program di lapangan. Kebijakan nasional adalah instrumen strategis yang menentukan arah, prioritas, dan mekanisme pemberdayaan, sementara peraturan pendukung memastikan implementasi yang konsisten dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan.

1. Kerangka Hukum Nasional

Di banyak negara Asia Tenggara, kebijakan pemberdayaan masyarakat marjinal tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan sektoral. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya, termasuk penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan. Di Filipina, *Local Government Code* tahun 1991 mengamanatkan desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan program berbasis kebutuhan lokal, sementara *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) tahun 1997 melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya.

Kerangka hukum yang jelas memberikan legitimasi bagi lembaga negara untuk mengalokasikan anggaran, menetapkan target, dan menugaskan instansi terkait. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi dengan realitas

Bagian 10 — Peran Lembaga Non-Negara

A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menjadi salah satu aktor paling menonjol dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat marjinal di Asia Tenggara. Keberadaan LSM melengkapi peran negara, khususnya dalam menjangkau kelompok-kelompok yang sering terabaikan oleh program pemerintah atau yang tinggal di wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap layanan publik. LSM sering kali memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pendekatan, kemampuan beradaptasi dengan konteks lokal, dan kebebasan dalam mengembangkan metode inovatif yang tidak selalu dapat dilakukan birokrasi pemerintah.



Gambar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia

Bagian 11 — Inovasi dan Teknologi untuk Pemberdayaan

A. Digitalisasi Layanan Publik

Digitalisasi layanan publik adalah proses transformasi sistem dan prosedur pelayanan pemerintah menjadi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat marjinal di Asia Tenggara, digitalisasi memiliki peran strategis karena dapat mengatasi hambatan geografis, mengurangi beban administrasi, serta membuka ruang partisipasi warga yang sebelumnya terpinggirkan dari proses pelayanan publik.

Perkembangan teknologi digital di Asia Tenggara mendorong pemerintah di kawasan ini mengadopsi berbagai platform *e-government* dan *m-government* (layanan publik berbasis perangkat seluler). Inovasi ini mulai merambah berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, hingga bantuan sosial. Misalnya, di Indonesia, *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap* (SAMSAT) telah menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring. Di Filipina, *PhilSys* atau Sistem Identifikasi Nasional memperkenalkan kartu identitas digital yang memudahkan warga mengakses bantuan sosial. Di Singapura, portal *SingPass* memungkinkan warga mengakses lebih dari 1.400 layanan publik hanya dengan satu akun digital.

Kekuatan digitalisasi bagi masyarakat marjinal terletak pada kemampuannya memutus rantai birokrasi panjang yang sering menjadi hambatan. Sebelumnya, warga di desa terpencil harus

Bagian 12 — Pendidikan Kritis dan Penguatan Kapasitas

A. Kurikulum Pendidikan Masyarakat

Kurikulum pendidikan masyarakat adalah seperangkat rancangan pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar kelompok atau komunitas tertentu di luar sistem pendidikan formal. Dalam konteks masyarakat marjinal di Asia Tenggara, kurikulum pendidikan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis yang sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan.

Pendidikan masyarakat tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi atau keterampilan teknis, tetapi juga untuk membangun kesadaran sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memampukan individu dan kelompok mengambil keputusan yang lebih baik atas kehidupannya. Prinsip ini berakar pada pemikiran *pedagogy of the oppressed* yang dikemukakan oleh Paulo Freire, di mana pendidikan dipandang sebagai alat pembebasan yang mendorong peserta didik untuk memahami realitas sosial mereka dan bertindak untuk mengubahnya.

Di Asia Tenggara, banyak program pendidikan masyarakat yang dirancang untuk mengatasi tantangan lokal yang spesifik. Misalnya, di Filipina, program *Alternative Learning System* (ALS) menyediakan kurikulum berbasis kebutuhan komunitas untuk orang dewasa yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar. Kurikulumnya mencakup literasi dasar, keterampilan hidup (*life skills*), dan kesadaran hak warga. Di Indonesia, Pusat Kegiatan

Bagian 13 — Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan

A. Hambatan Struktural dan Birokrasi

Hambatan struktural dan birokrasi merujuk pada rintangan yang muncul dari desain sistem pemerintahan, aturan, dan prosedur administrasi yang mengatur interaksi antara warga negara dan lembaga publik. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat marjinal di Asia Tenggara, hambatan ini sering menjadi faktor penghalang utama yang bersifat sistemik dan sulit diatasi tanpa perubahan kebijakan atau reformasi kelembagaan yang signifikan.

Salah satu ciri hambatan struktural adalah ketidakseimbangan kekuasaan yang terlembaga. Di banyak negara, proses pengambilan keputusan bersifat top-down, di mana kebijakan dirancang di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal secara mendalam. Masyarakat marjinal sering kali tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi mereka atau terlibat dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, program yang dirancang untuk pemberdayaan justru gagal menjawab kebutuhan spesifik komunitas sasaran.

Birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan serius. Prosedur administrasi yang berlapis, persyaratan dokumen yang rumit, serta koordinasi antarinstansi yang lemah membuat masyarakat marjinal kesulitan mengakses layanan publik. Contoh nyata terlihat pada proses pengajuan bantuan sosial di beberapa negara Asia Tenggara, yang sering kali membutuhkan dokumen kependudukan resmi, bukti kepemilikan tanah, atau sertifikat lain

Bagian 14 — Strategi dan Rekomendasi Penguatan

A. Pendekatan Inklusif dan Partisipatif

Pendekatan inklusif dan partisipatif merupakan strategi fundamental dalam pemberdayaan masyarakat marjinal, di mana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan, terutama kelompok sasaran. Dalam kerangka ini, inklusivitas berarti memastikan bahwa semua individu—tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnisitas, atau disabilitas—mendapatkan kesempatan yang setara untuk terlibat. Sementara itu, partisipasi menekankan keterlibatan langsung dan bermakna (*meaningful participation*) yang tidak sekadar bersifat simbolis atau formalitas.

Di Asia Tenggara, pendekatan ini semakin relevan karena karakteristik masyarakatnya yang multikultural, dengan keragaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang tinggi. Pemberdayaan yang tidak mempertimbangkan aspek keragaman cenderung menghasilkan kebijakan atau program yang timpang, bahkan berpotensi memperdalam kemarjinalan. Oleh karena itu, setiap intervensi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mengakomodasi kebutuhan yang beragam sekaligus membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat.

Pendekatan inklusif tidak hanya sebatas melibatkan kelompok marjinal sebagai penerima manfaat, tetapi memposisikan mereka sebagai aktor utama dalam proses perubahan. Misalnya, dalam program pengelolaan sumber daya

Bagian 15 — Menuju Masyarakat Inklusif Asia Tenggara

A. Pelajaran Penting yang Bisa Dipetik

Selama empat belas bab sebelumnya, pembahasan mengenai pengorganisasian dan pengembangan masyarakat marjinal di kawasan Asia Tenggara telah menggali dimensi yang sangat luas dan mendalam—mulai dari fondasi teoretis, kondisi empiris di berbagai negara, hingga strategi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan. Ringkasan temuan ini bukan sekadar rekapitulasi, melainkan juga sintesis dari wawasan yang muncul, yang diharapkan menjadi dasar pijakan bagi para pembaca, pembuat kebijakan, dan pelaku lapangan dalam merancang intervensi yang lebih efektif di masa depan.

Pertama, salah satu temuan paling menonjol adalah bahwa kemarjinalan di Asia Tenggara memiliki karakter multidimensi. Ia tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, representasi politik, dan hak asasi manusia. Kompleksitas ini berarti bahwa upaya pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial; pendekatan yang terintegrasi lintas sektor adalah syarat mutlak.

Kedua, konteks lokal terbukti sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Faktor-faktor seperti struktur sosial, nilai budaya, hubungan kekuasaan lokal, dan sejarah komunitas membentuk cara masyarakat merespons intervensi. Pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu efektif di wilayah lain, bahkan dalam negara yang sama. Ini

bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian seiring waktu.

Jika visi ini dapat diwujudkan, Asia Tenggara tidak hanya akan dikenal sebagai kawasan yang dinamis secara ekonomi, tetapi juga sebagai contoh global dari masyarakat yang inklusif, setara, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang dan bukti bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana seluruh warga dapat merasakan manfaatnya secara setara.

Penutup

Buku “*Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Marjinal di Kawasan Asia Tenggara*” ini telah berupaya memotret secara komprehensif realitas kemarjinalan di kawasan, sekaligus menawarkan strategi dan rekomendasi yang bersifat aplikatif. Selama lima belas bab, pembahasan telah membawa pembaca menelusuri berbagai dimensi: mulai dari fondasi konsep dan teori, gambaran kondisi empiris di setiap negara, tantangan struktural dan sosial-budaya yang dihadapi, hingga peta jalan (*roadmap*) pemberdayaan yang dirancang untuk jangka panjang.

Dari keseluruhan uraian, satu kesimpulan utama dapat ditarik: kemarjinalan di Asia Tenggara adalah persoalan kompleks yang memerlukan respon lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas batas negara. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau instan, melainkan melalui proses transformasi sosial yang konsisten, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, masyarakat marjinal harus ditempatkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk mengartikulasikan kebutuhan, menentukan arah pembangunan, dan mengelola perubahan.

Keberhasilan pemberdayaan akan sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) yang tegas, kebijakan yang berpihak secara nyata, serta kemitraan yang tulus antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan komunitas itu sendiri. Pengalaman dan studi kasus yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa ketika prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan transparansi dipegang teguh, hasil pemberdayaan tidak hanya terukur secara statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penulis menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Disrupsi teknologi, perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan dinamika sosial-ekonomi yang cepat akan menguji ketahanan masyarakat marjinal sekaligus menuntut inovasi dalam pendekatan pemberdayaan. Oleh karena itu, apa yang ditawarkan dalam buku ini bukanlah jawaban final, melainkan pijakan awal untuk melanjutkan diskusi, penelitian, dan kolaborasi yang lebih luas.

Harapan penulis, setiap pembaca tidak berhenti pada pemahaman, tetapi menjadikannya dorongan untuk bertindak. Baik di ruang kebijakan, ruang akademik, maupun ruang sosial, setiap individu memiliki peran dalam membangun Asia Tenggara yang setara, inklusif, dan berkeadilan. Semoga gagasan-gagasan yang tertuang di sini dapat menjadi bagian dari gerak kolektif menuju kawasan yang lebih manusiawi, di mana kemajuan diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana semua warganya dapat menikmati kehidupan yang layak, bermartabat, dan penuh peluang.

Daftar Pustaka

- Adams, J., Khan, H.T.A. & Raeside, R. (2020) *Research Methods for Business and Social Science Students*. 3rd ed. New Delhi: SAGE Publications.
- ADB (Asian Development Bank) (2022) *ASEAN Development Outlook 2022: Advancing Together*. Manila: Asian Development Bank.
- ASEAN Secretariat (2023) *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint Mid-Term Review*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Aziz, A. (2021) *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bebbington, A. & McCourt, W. (2019) *Development Success: Statecraft in the South*. London: Palgrave Macmillan.
- Bennett, A. & Checkel, J.T. (2020) *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Biddle, N. & Prout, S. (2020) *Indigenous Social and Emotional Wellbeing*. Canberra: ANU Press.
- Bryman, A. (2019) *Social Research Methods*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Chambers, R. (2019) *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chong, T. & Elies, S. (2018) *An ASEAN Community for All: Exploring the Social Pillar*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Christens, B.D. & Inzeo, P.T. (2021) *Community Power and Empowerment*. Oxford: Oxford University Press.

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2021) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dixon, J. (2020) *Social Welfare in ASEAN*. Singapore: Springer.

Foley, G. (2019) *Understanding Adult Education and Training*. 4th ed. Sydney: Allen & Unwin.

Fukuda-Parr, S. (2020) *Human Development and the Sustainable Development Goals*. New York: Routledge.

Gough, I. & Meadowcroft, J. (2022) *Rethinking Social Policy in the Global South*. London: Palgrave Macmillan.

Harris, J. (2021) *Development Theories Revisited*. London: Routledge.

Hill, H. & Menon, J. (2019) *ASEAN Economic Development*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Hossain, N. (2021) *The Politics of Poverty Reduction*. Oxford: Oxford University Press.

ILO (International Labour Organization) (2022) *World Employment and Social Outlook: Trends 2022*. Geneva: International Labour Organization.

Jones, L. & Smith, M. (2020) *Asia's Development Challenges*. London: Routledge.

Kabeer, N. (2020) *Gender, Labour, and Development*. London: Routledge.

Kaldor, M. (2021) *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. 4th ed. Cambridge: Polity Press.

Kusnadi (2020) *Pemberdayaan Nelayan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lewis, D. & Kanji, N. (2020) *Non-Governmental Organizations and Development*. 2nd ed. London: Routledge.

Manor, J. (2021) *Decentralization and Development*. Oxford: Oxford University Press.

- McCargo, D. (2019) *Southeast Asia: Politics, Meaning, and the Public Sphere*. London: Routledge.
- Mietzner, M. (2020) *Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Narayan, D. & Cassidy, M.F. (2020) *A Dimensional Approach to Measuring Social Capital*. Washington, DC: World Bank.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2022) *Social Institutions and Gender Index 2022*. Paris: OECD Publishing.
- Ortiz, I. & Cummins, M. (2021) *Global Inequality and Development*. London: Routledge.
- Pieterse, J.N. (2019) *Development Theory: Deconstructions/Reconstructions*. 4th ed. London: SAGE Publications.
- Ravallion, M. (2020) *Poverty Comparisons*. London: Routledge.
- Reid, A. (2019) *Southeast Asia in the Age of Commerce*. New Haven: Yale University Press.
- Robinson, M. & White, G. (2020) *The Democratic Developmental State*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (2020) *Development as Freedom*. Revised ed. New York: Knopf.
- Silver, H. (2021) *Social Exclusion and Solidarity*. London: Routledge.
- Smith, L.T. (2021) *Decolonizing Methodologies*. 3rd ed. London: Zed Books.
- Stiglitz, J.E. (2020) *People, Power, and Profits*. New York: W.W. Norton.
- Suharto, E. (2021) *Kebijakan Sosial: Perlindungan dan Pemberdayaan*. Bandung: Alfabeta.
- Tadjoeddin, M.Z. (2021) *Inequality, Poverty and Social Protection in Southeast Asia*. Singapore: Springer.

Taylor, E. & Taylor, D. (2020) *Community Development: A Critical Approach*. Sydney: Allen & Unwin.

Thompson, E.C. (2019) *Anthropology and Development in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Tremewan, C. (2019) *The Political Economy of Social Inequalities*. Singapore: NUS Press.

UNDP (United Nations Development Programme) (2022) *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2021) *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.

UNICEF (United Nations Children's Fund) (2022) *The State of the World's Children 2022*. New York: UNICEF.

United Nations (2023) *World Social Report 2023: Leaving No One Behind*. New York: UNDESA.

USAID (United States Agency for International Development) (2021) *Inclusive Development Handbook*. Washington, DC: USAID.

Van der Ploeg, J.D. (2020) *The New Peasantries*. London: Routledge.

Wahyudi, D. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: UB Press.

Walker, A. (2021) *Thailand's Political Peasants*. Madison: University of Wisconsin Press.

White, S.C. (2020) *Analysing Development Issues*. London: Routledge.

World Bank (2022) *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank.

World Bank (2023) *East Asia and Pacific Economic Update: Reforms for Recovery*. Washington, DC: World Bank.

Yusuf, M. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Profil Penulis



Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si., lahir di Dili pada 4 November 1974, sebagai putra dari Manuel Maia (+) dan Fernanda Maia (+). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia menikah dengan Romana Christiana Boy dan dikaruniai dua orang anak, Dirgatama Manuel Maia dan Maria Fernanda Maia, yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup dan pengabdianya.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 9 Dili dan diselesaikan pada tahun 1988. Ia melanjutkan ke SMP Katolik Paulus VI Dili hingga lulus pada tahun 1991, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Dili pada tahun 1994. Sejak masa sekolah, bakat kepemimpinan dan ketekunannya telah tampak melalui berbagai aktivitas organisasi dan kepemudaan yang diikutinya.

Minatnya pada bidang sosial membawanya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Ilmu Pekerjaan Sosial, dan meraih gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) pada tahun 1998. Ia kemudian memperdalam kajian sosiologi dengan menempuh Program Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Sains

(M.Si.) pada tahun 2004. Puncak capaian akademiknya diraih pada tahun 2020 dengan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Latar belakang akademik ini membentuk fondasi kuat bagi pemikirannya dalam bidang administrasi publik, kebijakan, dan pembangunan sosial.

Sejak usia muda, Dr. Carlos aktif dalam berbagai organisasi. Ia terlibat dalam Gerakan Pramuka dari jenjang Siaga hingga Penegak Saka Dirgantara di Dili (1984–1999). Kepemimpinannya terasah ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Katolik Paulus VI (1989–1991) serta menjadi anggota dan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Dili (1992–1993). Ia juga aktif dalam dunia bela diri melalui Perguruan Pencak Silat Padjadjaran (1991–1994) dan kemudian Tarung Derajat sejak 1994 hingga kini. Pengalaman ini memperkaya karakter kepemimpinan, ketegasan, serta daya juangnya.

Berbagai capaian penting turut mewarnai perjalanan organisasinya. Pada tahun 1991, ia menjadi peserta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, sebagai Pratama Kontingen Timor Timur. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Paskibraka Nasional dan dipercaya menjabat Lurah Putera Desa Bahagia serta Komandan Kelompok 17 Pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam bidang olahraga bela diri, ia pernah menjadi pelatih Tarung Derajat untuk Kontingen Timor Leste pada SEA Games XXVI tahun 2011 di Jakarta–Palembang, serta pelatih Kontingen Nusa Tenggara Timur pada Kejuaraan Nasional Piala Presiden IV tahun 2013 di Bandung. Keseluruhan pengalaman ini mencerminkan integritas, dedikasi, dan konsistensi dalam pengabdian.

Dalam ranah profesional, Dr. Carlos mengabdikan diri sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kupang dan Malang. Selain itu, sejak tahun

2007 ia juga menekuni dunia kewirausahaan, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan, sebagai wujud kemandirian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi.

Sebagai akademisi produktif, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas pendidikan, administrasi publik, kebijakan, demokrasi, pembangunan daerah, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi di era digital. Karya-karyanya merefleksikan konsistensi pemikiran yang kritis dan konstruktif terhadap dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Melalui buku-bukunya, ia mendorong inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat marjinal, serta pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Perjalanan akademik, pengalaman organisasi, serta kiprah profesional yang luas menjadikan Dr. Carlos Manuel Maia sebagai figur akademisi-praktisi yang utuh. Ia tidak hanya bergiat dalam ranah konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Dedikasinya terhadap pendidikan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial menghadirkan teladan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat bersinergi dengan tindakan nyata demi kemajuan masyarakat.

PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT MARJINAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA



Buku Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Marjinal di Kawasan Asia Tenggara membahas realitas kelompok yang tersisih dari akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan hak-hak sosial. Pembaca diajak memahami bahwa kemarjinalan bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga soal ketidakadilan, diskriminasi, dan lemahnya kesempatan untuk berdaya.

Melalui pembahasan tentang pemberdayaan komunitas, peran negara, LSM, sektor swasta, teknologi, pendidikan kritis, dan kolaborasi ASEAN, buku ini menawarkan arah perubahan yang inklusif dan berkelanjutan. Karya ini cocok bagi akademisi, aktivis, pembuat kebijakan, mahasiswa, dan siapa pun yang peduli pada masa depan Asia Tenggara yang lebih setara.



PENERBIT INDONESIA IMAJI

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com

ISBN 978-623-8067-98-5



9

786238

067985